

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat, seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang relatif mampu.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia pegadaian sebagai lembaga penyelenggara penyaluran kredit, khususnya kepada masyarakat

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, Semarang, Falkutas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hal 32.

golongan ekonomi lemah, sudah sangat dikenal oleh banyak kalangan. Prosedur pengucuran dana pinjaman yang dilakukan oleh pegadaian, harus di akui memang relatif sederhana, cepat, dan murah. Berdasarkan sisi kemudahan tersebut, maka pegadaian tidak jarang dijadikan tumpuan banyak pihak untuk mendapatkan kredit yang sangat mendesak diperlukan, dari pada lembaga perbankan yang mempergunakan prosedur yang cukup rumit.

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan badan hukum, yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132) Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), selanjutnya disebut PP No. 51/ 2011 Tentang Perubahan Perum Menjadi Persero.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Pegadaian (Persero) adalah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, baik dalam tatanan ekonomi nasional yang tumbuh pesat, maupun semakin banyaknya kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang membutuhkan bantuan dana pinjaman, seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dan dunia usaha, maka Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) guna memperluas jenis usaha dan jasa terkait agar tetap dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan diharapkan dapat menjangkau skala yang lebih luas lagi.

Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan tersebut, pegadaian merasa perlu melebarkan jenis lembaga jaminan, tidak hanya sebatas pada lembaga jaminan gadai saja. Gadai dalam kamus umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²

Sekarang ini produk-produk Pegadaian sudah semakin beragam, salah satunya adalah Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) diberikan kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Perolehan kredit diselenggarakan dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan, flat. Kredit Kreasi adalah modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.³

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan

² Balai Pustaka. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1997, hal 283.

³ Bumn.go.id/pegadaian/halaman/139, diakses_tanggal 12 April 2016.

diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang menganut prinsip *Constitutum Possessorium* yaitu penyerahan hak milik suatu benda oleh debitur kepada kreditur tanpa penyerahan benda secara fisik. Jaminan ini diakui sah oleh Undang-Undang apabila perjanjian pengikatan fidusia dituangkan dalam akta notariil dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP Baru ini menggantikan PP No. 86 Tahun 2000 dengan judul yang sama), pendaftaran jaminan fidusia di laksanakan oleh penerima fidusia (kreditur), pendaftaran jenis ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dengan menyertakan informasi sebagai berikut :⁴

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor, akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia

⁴ <http://www.indonesia-investmen.com/id/bisnis/prosedur-baru-untuk-mendaftarkan-jaminan-fidusia-di-Indonesia/item 5541>. Diakses tanggal 2 Maret 2016

(debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁵

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁶

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/ percekocokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.⁷

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana cara mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa

⁵ J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 319.

⁶ *Ibid*, hal. 320.

⁷ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra aditya, 2000, hal 57.

eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.⁸

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

⁸ *Ibid*, hal. 57

Pada prinsipnya PT. Pegadaian (persero) melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia baik terdaftar dan tidak terdaftar merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Meskipun, di dalam Pasal 29 tersebut berlaku umum untuk seluruh Jaminan Fidusia bagi lembaga Pembiayaan lainnya seperti leasing, namun masing-masing lembaga pembiayaan juga memiliki karakteristik atau ciri khusus dalam hal eksekusi.

Parate eksekusi atau eksekusi langsung bagi objek Jaminan Fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan umumnya dianut oleh lembaga Pembiayaan, begitu juga PT. Pegadaian (persero) yang dapat melakukan penjualan langsung terhadap objek Jaminan Fidusia melalui kekuatan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, secara umum tidak ditemukan masalah kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, permasalahan yang sering dihadapi hanyalah nasabah terkadang tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan utang, sehingga mencoba menyembunyikan objek jaminan fidusia atau menolak memberikan objek jaminan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisa dalam sebuah tesis yang berjudul : “ **KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI**

**KANTOR PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEKANBARU
KOTA ”**

